

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BATAM TAHUN
2025**



Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang – Batam Telepon (0778) 321370
Web. <http://dinsospm.batam.go.id/> Email :
dspmkotabatam@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

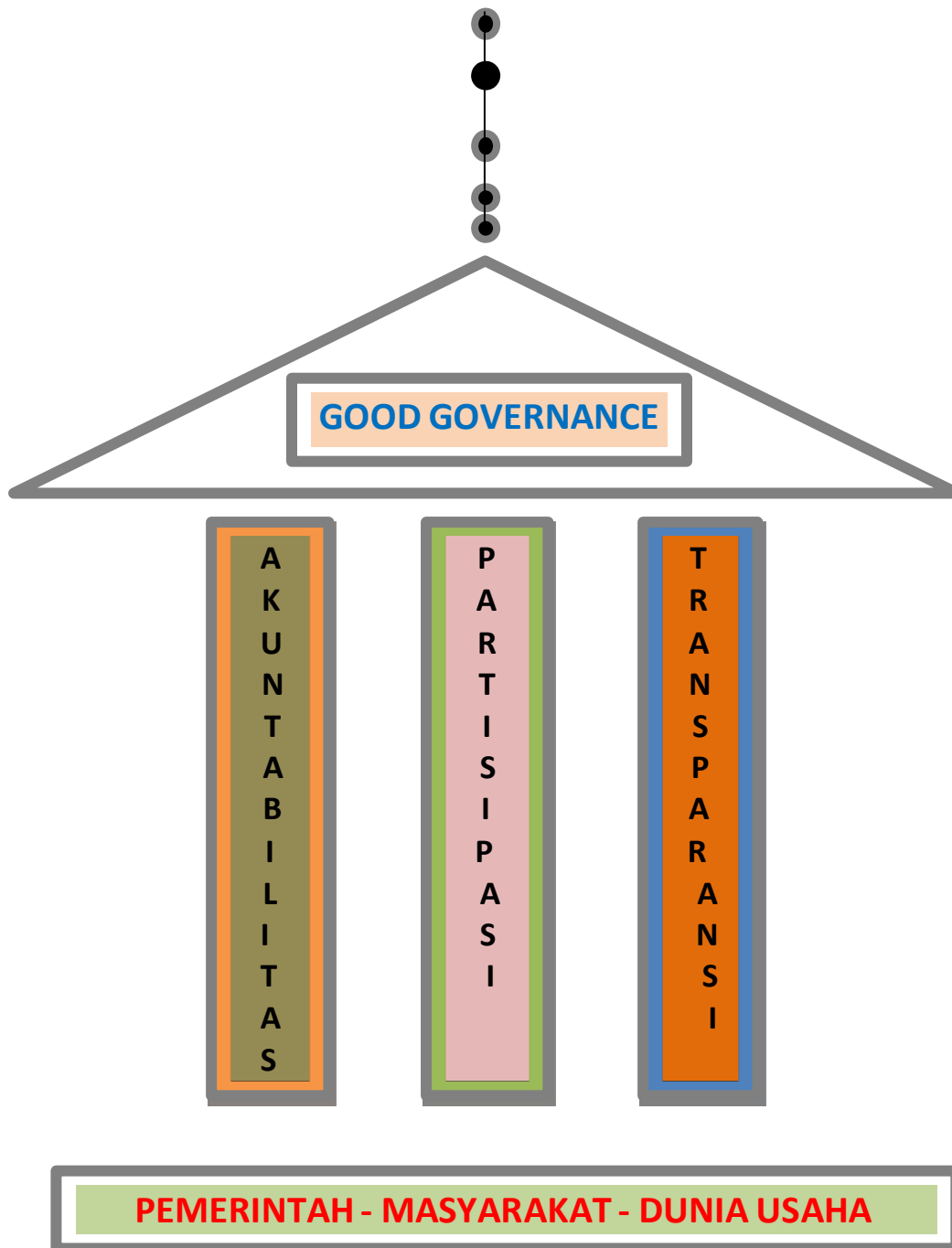
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sipiritual dan sosial warga Negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial nya. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (UU No II Thn 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Pekerjaan Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial , dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Terwujudnya suatu Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good Governance yang dicita-citakan berikut pilar-pilarnya seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dapat digambarkan sebagai berikut ;

Gambar 1. Pilar Good Governance



Selain itu LKJLP ini juga merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan LKjIP menggunakan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2004, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
12. Perda Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2010-2015
13. Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2017
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
15. Peraturan Walikota Batam Nomor, 42 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor, 42 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat mempertegas Peran dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam di Era Otonomi Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. TUGAS POKOK

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai Tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

b. F U N G S I

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan jaminan dan pemberdayaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan

jaminan dan pemberdayaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat;

- 3) pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanganan fakir miskin, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan jaminan dan pemberdayaan sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- 4) pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Dinas.
- 5) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- 6) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- 7) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- 8) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
- 10) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

1. Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Bidang Rehabilitasi Sosial;
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Tabel 1. Jumlah personil yang ada :

No	Jabatan	Jumlah	
1.	Kepala Dinas	1	Orang
2.	Sekretaris	1	Orang
3.	Kepala Bidang;		Orang
	a. Bidang Penanganan Fakir Miskin	1	Orang
	b. Bidang Rehabilitasi Sosial	1	Orang
	c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial	1	Orang
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Orang
4.	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	Orang
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1	Orang
6.	Kepala Sub.Tata Usaha (UPT)	1	Orang
7.	Jabatan Fungsional	9	Orang
8.	Staf / Pelaksana		
	Staf Gol. IV	-	Orang
	Staf Gol. III	12	Orang
	Staf Gol. II	4	Orang
	Staf Gol. I	1	
	P3K	21	
	THD/Honor		Orang
	JUMLAH	59	Orang

1.4 Aspek Strategi yang Berpengaruh

Beberapa aspek utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam antara lain:

- 1.4.1. Mendesaknya pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data PMKS, program dan kegiatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang perkembangan dan penyebaran populasinya semakin meningkat, beragam, luas dan kompleks.

- 1.4.2. Taraf Kesejahteraan Sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara layak dan normatif masih rendah perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik, sehingga kualitas pemenuhan terhadap kebutuhan dasarnya dapat tercapai.
- 1.4.3. Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Sasaran Garapan atau Dunia usaha Lainnya yang tersedia masih perlu adanya peningkatan partisipasi, pemberdayaan dan pengembangan dalam melaksanakan Pelayanan sosial.
- 1.4.4. Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan yang ada di Kelurahan meskipun sudah banyak yang berpartisipasi aktif, tetap perlu dorongan juga pemberdayaan yang lebih baik sehingga akan mewujudkan kemandirian dari masing-masing kelembagaan yang ada di Kelurahan untuk Pembangunan di Kota Batam.

1.5 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan menggunakan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu dari Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 - 2029 mencakup komponen-komponen Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta cara mencapainya (Kebijakan dan Program) Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Batam yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Visi : "BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA"

Misi 3 : Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis .

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada Tahun 2025 - 2029 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

- Misi 3 : *Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia*

Dengan Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif dan pemberdayaan kelembagaan kelurahan.

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu :

1. Cakupan pelayanan terhadap PPKS
2. Persentase kelembagaan kelurahan yang aktif

Untuk Mencapai Tujuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam tersebut di rumuskan dalam sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sebagai Berikut :

- a. Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) , dengan indikator : Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan.
- b. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat, dengan indikator : Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang terlindungi dengan jaminan social
- c. Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan dan Administrasi Kelurahan yang Baik dengan indikator: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi.
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan dengan indicator : Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

2.1.3 Kebijakan dan Program

Kebijaksanaan dan program merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kemampuan Potensi TKSK dan PKH dalam pendataan dan pendampingan sosial.
2. Optimalisasi rehabilitasi PPKS melalui reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, dan spirual, serta layanan kedaruratan dan rujukan bagi PPKS
3. Pendataan dan pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang Miskin / Pra Sejahtera
4. Pemberantasan kemiskinan Ekstrem yang terdapat di Kota Batam
5. Peningkatan dan Optimalisasi SDM melalui program tanggap bencana dan meningkatnya pelayanan terhadap Korban Bencana
6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kelurahan dalam pelaksanaan lomba kelurahan

Dengan program yang akan dilaksanakan antara lain :

No	Program	Indikator
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Satuan:Persentase)
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Satuan:Persentase)
		Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Satuan:Persentase)
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:Persentase)

4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persentase)
z		
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (Dengan Satuan:Persentase)
6	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya (Satuan:Persentase)
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (Satuan:Persentase)

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehinggadiharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%
2.	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) PPKS	Persentase PPKS yang direhab dan diantaskan	96%
3.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	90%
4.	Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik	100%
5.	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	100%

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 15.916.358.746	APBD II
2. Pemberdayaan Sosial	Rp 2.250.562.000	APBD II
3. Rehabilitasi Sosial	Rp 2.322.238.500	APBD II
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 6.891.338.000	APBD II
5. Penanganan Bencana	Rp 414.910.000	APBD II
6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 229.681.800	APBD II
7. Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 123.626.000	APBD II
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 18.025.545.775	APBD II
TOTAL	Rp 46.174.261.822	APBD II

WALIKOTA BATAM


 AMSAKAR ACHMAD

Batam, 14 Maret 2025
 KEPALA DINAS SOSIAL DAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KOTA BATAM


 Drs. LEO PUTRA, AP, M.Si
 NIP. 19750806 199501 1 001

2.3 Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam Renstra Perubahan memiliki 5 (Lima) sasaran dengan 5 (Lima) indikator yang diperjanjikan, didukung oleh Program sebanyak 8 (Delapan) dan 14 (Empat belas) Kegiatan serta 33 (Tiga puluh tiga) sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja. Adapun anggaran belanja langsung pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 46.174.261.822

Tabel 2.3
Anggaran dan Jumlah Program, Kegiatan
dan Subkegiatan dalam mendukung Sasaran
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2025
1	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2.376.808.000,00
			1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		2.376.808.000,00
				1.06.02.2.03.01 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.299.762.000,00
				1.06.02.2.03.02 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	152.805.000,00
				1.06.02.2.03.04 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	829.420.000,00

				Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				1.06.02.2.03.05 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	94.821.000,00
2		1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.605.396.600,00
			1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.605.396.600,00
				1.06.04.2.01.01 - Penyediaan Permakanan	133.343.000,00
				1.06.04.2.01.03 - Penyediaan Alat Bantu	79.728.000,00
				1.06.04.2.01.04 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	379.584.600,00
				1.06.04.2.01.06 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	702.962.000,00
				1.06.04.2.01.10 - Pemberian Layanan Kedaruratan	72.375.000,00
				1.06.04.2.01.12 - Pemberian Layanan Rujukan	237.404.000,00
3		1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL UPTD P2PMKS NILAM SURI			753.942.600,00

			1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		753.942.600,00
				1.06.04.2.01.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	753.942.600,00
4	Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan dan Administrasi Kelurahan yang Baik	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			223.190.000,00
			2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		223.190.000,00
				2.13.04.2.01.18 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	223.190.000,00
5		2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			22.345.299.000,00
			2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		22.345.299.000,00

				2.13.05.2.01.03 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	21.709.797.000,00
				2.13.05.2.01.06 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	175.775.000,00
				Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	459.727.000,00
6	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			10.638.224.000,00
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		10.638.224.000,00
				1.06.05.2.02.01 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.316.856.000,00
				1.06.05.2.02.03 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.321.368.000,00
7		1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			575.832.000,00
			1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		575.832.000,00
				1.06.06.2.01.01 - Penyediaan Makanan	575.832.000,00
8		1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			229.681.800,00
			1.06.07.2.01 - Pemeliharaan		229.681.800,00

			Taman Makam Pahlawan		
				1.06.07.2.01.02 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	157.681.800,00
				1.06.07.2.01.03 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	72.000.000,00
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.919.084.483,00
			1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		118.493.000,00
				1.06.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.493.000,00
			1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.662.253.003,00
				1.06.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.579.263.003,00
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	82.990.000,00
			1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		286.983.000,00
				1.06.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.688.000,00
				1.06.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.652.000,00
				1.06.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.393.000,00
				1.06.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.250.000,00

			1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.709.937.200,00
				Pengadaan Kendaraan Dinas jabatan	484.095.000,00
				Pengadaan Mebel	122.953.000,00
				1.06.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.834.000,00
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	893.055.200,00
			1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		687.886.680,00
				1.06.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.990.000,00
				1.06.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.896.680,00
			1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.453.531.600,00
				1.06.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.080.000,00
				1.06.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.090.200,00
				1.06.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.480.000,00

				1.06.01.2.09.10 - Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.892.881.400,00
10		1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPTD P2PMKS NILAM SURI			421.655.600,00
			1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		421.655.600,00
				1.06.01.2.09.10 - Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.655.600,00
TOTAL					56.089.114.083

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Kota Batam dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut

Tabel 3. Skala Penilaian

SKALA PENILAIAN :	
SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d < 85	Berhasil
55 s/d < 70	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	Kurang Berhasil

Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3.2 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2025, secara umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam pada tahun 2025 dengan Target sesuai dengan RPJMD Perubahan yaitu;

PENGUKURAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA				ANGGARAN			
					TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	TRIWULAN IV		PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	TRIWULAN IV	
							REALISASI	%			REALISASI	%
1	2	3	4	5	7		14	15	17		24	25
											Rp 51.114.773.216	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial terhadap PPKS			Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	96 (Persentase)		96				Rp 1.954.780.200	
		1.06.02 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	100 (Persentase)		100				Rp 1.954.780.200	
			1.06.02.2.03 ~ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	100 (Persentase)		100				Rp 1.954.780.200	
				1.06.02.2.03.0001 ~ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	93.00 (Orang)	93.00 (Orang)	93	100	1.297.050.000	1.299.762.000	Rp 929.800.000	71,54
				1.06.02.2.03.0002 ~ Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.00 (Orang)	12.00 (Orang)	12	100	155.769.000	152.805.000	Rp 114.320.200	74,81

LKjIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

	1.06.02.2.03.0004 ~ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26.00 (Lembaga)	26.00 (Lembaga)	17	65,38	847.550.000	829.420.000	Rp 826.240.000	99,62
	1.06.02.2.03.0005 ~ Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	36.00 (Sertifikat)	36.00 (Sertifikat)	10	27,78	98.914.000	94.821.000	Rp 84.420.000	89,03
1.06.04 ~ PROGRAM REHABILITAS I SOSIAL	2. Persentase penyandang disabilitas dan tuna sosial yang direhabilitasi	58.06 (Persentase)		58				Rp 1.998.965.229	
1.06.04 ~ PROGRAM REHABILITAS I SOSIAL	1. Persentase anak terlantar dan lansia terlantar yang direhabilitasi;	90.91 (Persentase)		90				Rp 1.998.965.229	
	1.06.04.2.01 ~ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial yang direhabilitasi	66.22 (Persentase)		100			Rp 1.998.965.229	
	1.06.04.2.01.0001 ~ Penyediaan Permakanan	55.00 (Orang)	55.00 (Orang)	25	45,45	235.428.600	133.343.000	Rp 81.595.000	61,19
	1.06.04.2.01.0003 ~ Penyediaan Alat Bantu	20.00 (Orang)	20.00 (Orang)		0	128.510.000	79.728.000	Rp 49.704.998	62,34

LKjIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

	1.06.04.2.01.0004 ~ Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	40.00 (Orang)	40.00 (Orang)	26	65	420.377.600	379.584.600	Rp 355.709.500	93,71
	1.06.04.2.01.0005 ~ UPTD P2PMKS NILAM SURI ~ Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	550.00 (Orang)	550.00 (Orang)	150	27,27	823.923.500	753.942.600	Rp 616.456.395	81,76
	1.06.04.2.01.0006 ~ Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	550.00 (Orang)	550.00 (Orang)	226	41,09	774.266.000	702.962.000	Rp 672.879.536	95,72
	1.06.04.2.01.0010 ~ Pemberian Layanan Kedaruratan	15.00 (Orang)	15.00 (Orang)	7	46,67	72.375.000	72.375.000	Rp 38.140.000	52,7
	1.06.04.2.01.0012 ~ Pemberian Layanan Rujukan	70.00 (Orang)	70.00 (Orang)	31	44,29	266.986.000	237.404.000	Rp 184.479.800	77,71
Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Peresentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	99 (Persentase)		100				Rp 21.526.650.956	
2.13.05 ~ PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase kelurahan dengan kelembagaan masyarakat yang aktif	99.22 (Persentase)		100				Rp 21.526.650.956	

LKJIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

	2.13.05.2.01 ~ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	100 (Persentase)		100				Rp 21.526.650.956	
	2.13.05.2.01.0003 ~ Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		711.00 (Lembaga)	711.00 (Lembaga)	711	100	17.852.286.776	21.709.797.000	Rp 21.139.448.452	97,37
	2.13.05.2.01.0006 ~ Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3.00 (Laporan)	3.00 (Laporan)	3	100	261.277.000	175.775.000	Rp 142.279.504	80,94
	2.13.05.2.01.0007 ~ Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		2.00 (Laporan)	2.00 (Laporan)	2	100	473.861.000	459.727.000	Rp 244.923.000	53,28
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial		90 (Persentase)		90				Rp 10.501.356.053	

LKjIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

1.06.05 ~ PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	79.35 (Persentase)		79,35				Rp 9.752.733.031	
1.06.05.2.02 ~ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang divalidasi dan Jumlah mahasiswa yang di bantu	100 (Persentase)		100				Rp 9.752.733.031	
	1.06.05.2.02.0001 ~ Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31320.00 (Orang)	31320.00 (Orang)	31320	100	926.950.000	1.316.856.000	Rp 914.107.831	69,42
	1.06.05.2.02.0003 ~ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2026.00 (Keluarga)	4006.00 (Keluarga)	4000	99,85	2.989.428.000	9.321.368.000	Rp 8.838.625.200	94,82
1.06.06 ~ PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 (Persentase)		100				Rp 540.440.933	
1.06.06.2.01 ~ Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial	100 (Persentase)		100				Rp 540.440.933	
	1.06.06.2.01.0001 ~ Penyediaan Makanan	500.00 (Orang)	500.00 (Orang)	600	100	423.040.000	575.832.000	Rp 540.440.933	93,85
1.06.07 ~ PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP yang terlaksana	93.1 (Persentase)		93				Rp 208.182.089	
1.06.07.2.01 ~ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana TMP yang direhab dan dipelihara	93.1 (Persentase)		93,1				Rp 208.182.089	
	1.06.07.2.01.0002 ~ Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.00 (Makam)	45.00 (Makam)	45	100	171.746.800	157.681.800	Rp 154.182.089	97,78

LKJIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

	1.06.07.2.01.0003 ~ Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	11	91,67	72.000.000	72.000.000	Rp 54.000.000	75
Meningkatnya kelurahan dengan adminitrasi pemerintahan yang baik	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan yang baik	94 (Persentase)		94				Rp 146.510.454	
2.13.04 ~ PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan administrasi pemerintahan yang baik	93.75 (Persentase)		94				Rp 146.510.454	
2.13.04.2.01 ~ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	60 (Kelurahan)		60				Rp 146.510.454	
	2.13.04.2.01.0018 ~ Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3.00 (Dokumen)	3.00 (Dokumen)	3	100	172.540.000	223.190.000	Rp 146.510.454	65,64
Meningkatnya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100 (Persentase)		100				Rp 14.986.510.324	
1.06.01 ~ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 (Persentase)		100				Rp 14.986.510.324	
1.06.01.2.01 ~ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	2 (Dokumen)		2				Rp 113.964.488	
	1.06.01.2.01.0001 ~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 (Dokumen)	2.00 (Dokumen)	2	100	164.570.000	118.493.000	Rp 113.964.488	96,18

LKJIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

1.06.01.2.02 ~ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 (Persentase)		100				Rp 9.919.089.635	
	1.06.01.2.02.0001 ~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.00 (Orang/bulan)	60.00 (Orang/bulan)	60	100	10.331.994.226	11.579.263.003	Rp 9.836.099.635	84,95
	1.06.01.2.02.0002 ~ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 (Dokumen)	12.00 (Dokumen)	20	100	85.540.000	82.990.000	Rp 82.990.000	100
1.06.01.2.06 ~ Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 (Persentase)		100				Rp 230.862.862	
	1.06.01.2.06.0001 ~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.00 (Paket)	1.00 (Paket)	1	100	25.432.800	12.688.000	Rp 10.599.000	83,54
	1.06.01.2.06.0002 ~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.00 (Paket)	3.00 (Paket)	3	100	168.852.000	164.652.000	Rp 137.527.000	83,53
	1.06.01.2.06.0004 ~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.00 (Paket)	5.00 (Paket)	3	60	30.650.000	23.393.000	Rp 21.649.000	92,54
	1.06.01.2.06.0009 ~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	9	75	172.898.000	86.250.000	Rp 61.087.862	70,83
1.06.01.2.07 ~ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 (Persentase)		100				Rp 1.604.411.570	
	1.06.01.2.07.0001 ~ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 (Unit)	1.00 (Unit)	1	100	484.095.000	484.095.000	Rp 440.600.000	91,02

LKJIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

	1.06.01.2.07.0005 ~ Pengadaan Mebel	20.00 (Unit)	20.00 (Unit)	20	100	123.647.000	122.953.000	Rp 98.605.000	80,2
	1.06.01.2.07.0006 ~ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.00 (Unit)	22.00 (Unit)	22	100	228.786.000	209.834.000	Rp 193.950.000	92,43
	1.06.01.2.07.0011 ~ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.00 (Unit)	2.00 (Unit)	2	100	893.055.200	893.055.200	Rp 871.256.570	98,58
1.06.01.2.08 ~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100 (Persentase)		100				Rp 601.203.030	
	1.06.01.2.08.0002 ~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	11	91,67	339.990.000	339.990.000	Rp 328.461.700	96,61
	1.06.01.2.08.0004 ~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00 (Laporan)	12.00 (Laporan)	6	50	467.407.520	347.896.680	Rp 272.741.330	78,4
1.06.01.2.09 ~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 (Persentase)		100				Rp 2.516.978.739	
	1.06.01.2.09.0001 ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 (Unit)	1.00 (Unit)	1	100	41.080.000	41.080.000	Rp 34.600.000	84,23
	1.06.01.2.09.0002 ~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.00 (Unit)	7.00 (Unit)	7	100	357.090.200	357.090.200	Rp 345.841.600	96,85

LKjIP Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025

	1.06.01.2.09.0006 ~ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.00 (Unit)	120.00 (Unit)	72	60	191.260.000	162.480.000	Rp 146.900.000	90,41
	1.06.01.2.09.0010 ~ UPTD P2PMKS NILAM SURI ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.00 (Unit)	1.00 (Unit)		0	421.655.600	421.655.600	Rp 414.435.102	98,29
	1.06.01.2.09.0010 ~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.00 (Unit)	2.00 (Unit)		0	1.635.498.000	1.892.881.400	Rp 1.575.202.037	83,22
								Rp 51.114.773.216	

3.4. Realisasi Keuangan

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 56.08.114.083 dengan realisasi sebesar Rp. 51.114.773.216,- Lima puluh Satu Miliar Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Belas rupiah) Persentase realisasi tersebut sebesar 91.13 %. (Sembilan Puluh Satu Koma Tiga Belas persen).

Realisasi anggaran tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

NO	UNIT KERJA / PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
					KEUANGAN		FISIK
					Rp	%	%
1	2	3	4	5	9	10	12
	TOTAL DATA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SEMUA SUB ORGANISASI			56.089.114.083,00	51.114.773.216,00	91,13%	99,62%
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			33.520.625.083,00	29.441.611.806,00	87,83%	100,00%
1	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.919.084.483,00	14.572.075.222,00	86,13%	100,00%
		1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		118.493.000,00	113.964.488,00	96,18%	100,00%
			1.06.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.493.000,00	113.964.488,00	96,18%	100,00%
		1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.662.253.003,00	9.919.089.635,00	85,05%	100,00%
			1.06.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.579.263.003,00	9.836.099.635,00	84,95%	100,00%
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	82.990.000,00	82.990.000,00	100,00%	100,00%
		1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		286.983.000,00	230.862.862,00	80,44%	100,00%
			1.06.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.688.000,00	10.599.000,00	83,54%	100,00%
			1.06.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.652.000,00	137.527.000,00	83,53%	100,00%

			1.06.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.393.000,00	21.649.000,00	92,54%	100,00%
			1.06.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.250.000,00	61.087.862,00	70,83%	100,00%
		1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.709.937.200,00	1.604.411.570,00	93,83%	100,00%
			Pengadaan Kendaraan Dinas jabatan	484.095.000,00	440.600.000,00	91,02%	100,00%
			Pengadaan Mebel	122.953.000,00	98.605.000,00	80,20%	100,00%
			1.06.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209.834.000,00	193.950.000,00	92,43%	100,00%
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	893.055.200,00	871.256.570,00	97,56%	100,00%
		1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		687.886.680,00	601.203.030,00	87,40%	100,00%
			1.06.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.990.000,00	328.461.700,00	96,61%	100,00%
			1.06.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.896.680,00	272.741.330,00	78,40%	100,00%
		1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.453.531.600,00	2.102.543.637,00	85,69%	100,00%
			1.06.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.080.000,00	34.600.000,00	84,23%	100,00%
			1.06.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.090.200,00	345.841.600,00	96,85%	100,00%
			1.06.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.480.000,00	146.900.000,00	90,41%	100,00%
			1.06.01.2.09.10 - Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.892.881.400,00	1.575.202.037,00	83,22%	100,00%
2	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			2.376.808.000,00	1.954.780.200,00	82,24%	100,00%
		1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		2.376.808.000,00	1.954.780.200,00	82,24%	100,00%
			1.06.02.2.03.01 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.299.762.000,00	929.800.000,00	71,54%	100,00%

			1.06.02.2.03.02 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	152.805.000,00	114.320.200,00	74,81%	100,00%
			1.06.02.2.03.04 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	829.420.000,00	826.240.000,00	99,62%	100,00%
			1.06.02.2.03.05 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	94.821.000,00	84.420.000,00	89,03%	100,00%
3	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.605.396.600,00	1.382.508.834,00	86,12%	100,00%
		1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.605.396.600,00	1.382.508.834,00	86,12%	100,00%
			1.06.04.2.01.01 - Penyediaan Permakanan	133.343.000,00	81.595.000,00	61,19%	100,00%
			1.06.04.2.01.03 - Penyediaan Alat Bantu	79.728.000,00	49.704.998,00	62,34%	100,00%
			1.06.04.2.01.04 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	379.584.600,00	355.709.500,00	93,71%	100,00%
			1.06.04.2.01.06 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	702.962.000,00	672.879.536,00	95,72%	100,00%
			1.06.04.2.01.10 - Pemberian Layanan Kedaruratan	72.375.000,00	38.140.000,00	52,70%	100,00%
			1.06.04.2.01.12 - Pemberian Layanan Rujukan	237.404.000,00	184.479.800,00	77,71%	100,00%
4	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			10.638.224.000,00	9.752.733.031,00	91,68%	100,00%
		1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		10.638.224.000,00	9.752.733.031,00	91,68%	100,00%
			1.06.05.2.02.01 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.316.856.000,00	914.107.831,00	69,42%	100,00%
			1.06.05.2.02.03 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.321.368.000,00	8.838.625.200,00	94,82%	100,00%
5	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			575.832.000,00	540.440.933,00	93,85%	100,00%

		1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	575.832.000,00	540.440.933,00	93,85%	100,00%
		1.06.06.2.01.01 - Penyediaan Makanan	575.832.000,00	540.440.933,00	93,85%	100,00%
6	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		229.681.800,00	208.182.089,00	90,64%	100,00%
		1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	229.681.800,00	208.182.089,00	90,64%	100,00%
		1.06.07.2.01.02 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	157.681.800,00	154.182.089,00	97,78%	100,00%
		1.06.07.2.01.03 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	72.000.000,00	54.000.000,00	75,00%	100,00%
7	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		223.190.000,00	146.510.454,00	65,64%	100,00%
		2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	223.190.000,00	146.510.454,00	65,64%	100,00%
		2.13.04.2.01.18 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	223.190.000,00	146.510.454,00	65,64%	100,00%
8	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		22.345.299.000,00	21.526.650.956,00	96,34%	99,04%
		2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.345.299.000,00	21.526.650.956,00	96,34%	99,04%
		2.13.05.2.01.03 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	21.709.797.000,00	21.139.448.452,00	97,37%	100,00%
		2.13.05.2.01.06 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	175.775.000,00	142.279.504,00	80,94%	100,00%
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	459.727.000,00	244.923.000,00	53,28%	53,28%
	UPTD P2PMKS NILAM SURI					
9	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		421.655.600,00	414.435.102,00	98,29%	100,00%
		1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.655.600,00	414.435.102,00	98,29%	100,00%

			1.06.01.2.09.10 - Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.655.600,00	414.435.102,00	98,29%	100,00%
10	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			753.942.600,00	616.456.395,00	81,76%	100,00%
		1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		753.942.600,00	616.456.395,00	81,76%	100,00%
			1.06.04.2.01.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	753.942.600,00	616.456.395,00	81,76%	100,00%
TOTAL				56.089.114.083,00	51.114.773.216,00	91,13%	99,62%

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Pada Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Secara keseluruhan dari 2 sasaran Strategis berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 dan menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran capaian kinerja “*Cukup Berhasil*”, Sasaran “Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan” dengan Pencapaian indikator jika di rata 99 %

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Dalam Tahun 2025 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam meliputi :

1. Tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Wilayah Kota Batam, disebabkan tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Ekonomi, Budaya, Politik, Etnis, Agama, Penyimpangan perilaku, Hukum, industrialisasi dan urbanisasi). Adapun luasnya wilayah Kota Batam yang merupakan daerah kepulauan terdiri dari 12 kecamatan dan 64 Kelurahan. Data Tahun 2024 (DTKS) 331.829 jiwa dari sebelumnya 364.308 jiwa , artinya ada penurunan dari jumlah data yang ada kemudian dilakukan Validasi, hal ini kedepan akan dipergunakan sebagai acuan Basis Data kemiskinan di Kota Batam sehingga dapat mempermudah dalam penentuan Program pengentasan dan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, (kemiskinan).

2. Masih perlu di optimalkan kembali peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungannya dengan baik.
3. Belum adanya keseimbangan antara populasi PMKS yang harus ditangani dan dengan ketersediaan dana, hal ini mengakibatkan upaya penanganan tidak dapat dilaksanakan secara serempak, sementara keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas tinggi, belum dapat bersinergi dengan daerah lain.
4. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang dimiliki baik di kalangan Legislatif, aparatur pemerintahan maupun masyarakat khususnya kalangan yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial mitra kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Tercapainya program-program APBD II dikarenakan ada beberapa kegiatan Dalam melaksanakan kegiatan atau penananagan jika ada kejadian terlebih dahulu contoh ; Kejadian bencana Alam/Sosial, Penanganan Orang Terlantar dan Penanganan Pemakaman bagi Tunawan (Mr/Mrs meninggal terlantar), sementara untuk Program Nasional melalui Program Keluarga harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota batam cukup berjalan lancar, meskipun ada beberapa kendala di lapangan, dapat di koordinasikan Lintas Dinas / Lembaga sebagai pelaksana Program di Daerah.

Langkah Antisipatif : Dalam memecahkan kendala hambatan diatas Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menentukan skala prioritas baik lokasi maupun jumlah besaran anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan dan memberikan bantuan penunjang

dalam rangka meningkatkan kemampuan, tenaga/Sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang terdapat pada Sumber Kesejahteraan Sosial guna meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial pada masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam telah menetapkan strategi pemecahan masalah pencapaian sasaran, program dan kegiatan untuk Tahun 2025 melalui strategi sbb :

1. Peningkatan mutu pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya kalangan masyarakat yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Wilayah Kota Batam.
2. Menggali anggaran selain dari APBD II juga dari APBD I, APBN dan Dari Dunia Usaha melalui Dana CSR walaupun baru beberapa Perusahaan yang telah melakukan kerjasama dalam peningkatan SDM bagi PMKS, sementara sebagian besar dari Perusahaan mempergunakan dana CSR nya bentuknya masih pada acara-acara serimoni (Ulang Tahun Perusahaan).
3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia usaha, dengan harapan dapat menyalurkan SDM bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah diberikan Bimbingan dan Keterampilan setelah selesai langsung dapat disalurkan dan bekerja.

4. Meningkatkan Pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada di tingkat Kelurahan sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi bagi Masyarakat dalam Pembangunan di Kota Batam.

Batam, 31 Januari 2026

Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdaaan Masyarakat Kota
Batam



[Handwritten signature]
Zulkifli Aman, S.Sos, MM

NP. 19691109 199703 1 005

LAMPIRAN

LKjIP 2024

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

TABEL : VI.1

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YANG
MENGACU KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(RPJMD 2025 - 2029)

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan Pelayanan Terhadap PPKS	Persentase	50	50	60	70	80	90	100	
2	Persentase Kelembagaan Kelurahan yang aktif	Persentase	95	95	96	97	98	99	100	